

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2015-2019



SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO
BAA, 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1..... Latar Belakang	1
1.2..... Landasan Hukum.....	2
1.3..... Maksud dan Tujuan.....	3
1.4..... Sistematika.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN ROTE NDAO	
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	5
2.2 Sumber daya Dewan Pengurus KORPRI	9
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat KORPRI	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DewanKORPRI.....	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	22
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1	Visi dan Misi Sekretariat KORPRI Kabupaten Rote Ndao	31
4.2	Tujuan dan Sasaran Sekretariat KORPRI Kabupaten Rote Ndao.....	31
4.3	Strategi dan Kebijakan	32
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1	Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat KORPRI Kabupaten Rote Ndao..	35
5.2	Indikator Kinerja.....	35
5.3	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	36
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN ROTE NDAO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
BAB VII	PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Dengan Kemajuan Pembangunan di segala bidang baik fisik, mental Spriritual, maka perlu suatu perencanaan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang, bertolak dari kondisi tersebut maka keinginan untuk membenahi pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan agar berjalan Efektif dan Efisien oleh aparatur pemerintah, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI perlu merencanakan Program yang berkesinambungan yang berbasis otonomi untuk mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang bekerja secara Profesional , Rasional, Kreatif, Efisiensi, Netral dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan diadopsinya paradigma baru sesuai dengan reformasi guna melanjutkan Good Corporate Governace yaitu Organisasi yang ramping dan kaya fungsi dengan penataan Organisasi melalui

- a. Penetapan tugas pokok dan Fungsi KORPRI
- b. Pengangkatan Kepengurusan KORPRI didasarkan pada Keputusan Hasil MUNAS, Muspov dan MUSKAB
- c. Kepengurusan KORPRI bersifat Kolektif sebagai Consil.
- d. Terselenggaranya pembinaan Korps Pegawai Republik Indonesia

Dengan demikian diharapkan rencana strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat berjalan sesuai acuan dalam penetapan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Rote Ndao .

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Melihat Kondisi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao dan latar belakang disusunnya rencana Strateg disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 s/d 2019, serta memperhatikan kebijakan dan proiritas program pemerintah kabupaten dan untuk memberikan gambaran dan kondisi sehingga memberikan arah penyusunan Renstra Sekretariat Korpri Kabupaten Rote Ndao, selain itu juga dibahas maksud dan tujuan serta landasan Penyusunan Renstra Sekretariat KORPRI baik dari aspek perencanaan dan kebijakan Nasional, daerah dan kebijakan sektor lain yang berkaitan dengan Sekretariat KORPRI yang merupakan dokumen penyebaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rote Ndao, dan tidak dapat dipisahkan dari Renstra Korps Pegawai Republik Indonesia yang diputuskan lewat hasil Musyawarah Nasional VII KORPRI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif

Bagan alir kedudukan Renstra SKPD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

	Pedoman		Dijabarkan	
	Diperhatikan		Diperhatikan	
	Pedoman		Dijabarkan	
20 Tahun		5 Tahun	Pedoman	1 tahun Pedoman Diperhatikan
	Diperhatikan		5 Tahun	1 Tahun
	Pedoman			Diperhatikankan
20 Tahun		5 Tahun	Pedoman	
			Diperhatikan	Pedoman
			Pedoman	
				Pedoman
			5 Tahun	1 Tahun

I.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 Tanggal, 29 November 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI tanggal 19 November 2009 Tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KORPRI;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan sekretaris Jendral DPN KORPRI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi/ Kabupaten/ Kota KORPRI tanggal 1 Juli 2008;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI .

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai acuan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pembinaan;
3. Sebagai acuan koordinasi ke dalam maupun keluar SKPD;
4. Memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait dengan rencana pembangunan tahunan.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Menjabarkan visi, dan misi kepala daerah ke dalam visi dan misi SKPD;
2. Menentukan kegiatan prioritas berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
3. Menjabarkan indikator capaian program 5 tahunan ke dalam target tahunan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

Bab II : gambaran Umum SKPD

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat KORPRI

Bab III: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Isu-isu Strategi Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao
- 4.2. Tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

Bab V: Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, Sasaran dan Pendanaan
Indikatif

- 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao

Bab VII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

2.1. Tugas Pokok dan fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4/KEP/HK/2011 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok pelayanan teknis operasional dan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan tugas dewan pengurus KORPRI Kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok diatas Kantor Sekretariat KORPRI mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus korpri Kabupaten.
2. Penyelenggaraan pelayanan Administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan pengurus KORPRI Kabupaten.
3. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan Korpri di setiap tingkatan dan badan hukum lainnya
4. Pelaksanaan Administrasi ketatatusahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

2.2.1. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Rote Ndao, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 1 (Satu) orang Sekretaris dan 3 kepala Sub bagian. Adapun tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh masing-masing Pejabat struktural adalah sebagai berikut :

2.2.2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, membagi tugas, memberikan petunjuk, membina, mengarahkan dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di Sub Bagian Umum dan Kerja sama, Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial, dan menandatangani laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas di Sekretariat Dewan pengurus KORPRI.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Membuat rencana Operasional di sekretariat berdasarkan rencana Program Sekretariat Dewan pengurus KORPRI;
 - b. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya
 - c. Memberikan petunjuk dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan target yang direncanakan;
 - d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan Membandingkan rencana, Peraturan dan Prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil yang diharapkan;
 - e. Melaporkan kegiatan di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

2.2.3. Kasubag Umum dan Kerja sama

- a. Sub Bagian Umum dan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kerja Sama, Membagi Tugas Memberi Petunjuk, Membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, memberi pelayanan administratif dan fungsional kepada satuan unit kerja serta mengkoordinasi, mengevaluasi, dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) sub bagian Umum dan kerja sama mempunyai fungsi :
 1. Membuat rencana kegiatan di sub Bagian Umum dan Kerja sama berdasarkan rencana Operasional Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
3. Memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan target yang direncanakan;
4. Melaksanakan urusan penata usahaan, surat menyurat rumah tangga, dinas, Kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan;
5. Memantau persiapan bahan untuk menyusun anggaran pendapatan;
6. melaksanakan urusan penatausahaan Keuangan;
7. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai masukan untuk penyempurnaan program selanjutnya;
8. melaporkan kegiatan di sub Bagian Umum dan Kerja Sama sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2.2.4. Kasubag Olah Raga, Seni Budaya, Mental Ddan Rohani

(1) Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :

- a. Membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
- b. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- c. Memberikan petunjuk dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan target yang direncanakan;
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai masukan untuk penyempurnaan program selanjutnya;
- e. Melaporkan kegiatan di Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.5. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Membuat rencana kegiatan di Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - b. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. Memberikan petunjuk dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan target yang direncanakan;
 - d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai masukan untuk penyempurnaan program selanjutnya;
 - e. Melaporkan kegiatan di Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3. Struktur Organisasi

Kantor Sekretariat Korpri Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh 1 Orang Sekretaris dan di bantu oleh 3 (tiga) kepala Sub Bagian. Adapun struktur Kantor Sekretariat Korpri Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerja Sama
- b. Sub Bagian Olahraga, seni Budaya Mental dan Rohani
- c. Sub Bagian Usaha Bantuan Hukum dan Sosial

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIATA DEWAN PENGURUS KORPRI

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan tersebut.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 16 orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, struktur kepegawaian, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian Sekretariat Dewan Pengurus Korpri didukung oleh 16 (enam belas) orang PNS dengan klasifikasi kepangkatan dan tingkat pendidikan sebagai berikut

- a. Golongan IV : 9 orang
- b. Golongan III : 5 orang
- c. Golongan II : 2 orang

Pendidikan

- a. S2 : 2 Orang
- b. S1 : 10 orang
- c. Sarjana Muda : 2 orang
- d. SLTA : 2 orang

Susunan Kepegawaian Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Rote Ndao sebagaimana

terlihat dalam table 2.1 dan table 2.2 berikut ini

Tabel 2.1.
Susunan Kepangkatan / Golongan

No	Nama Bagian	Pangkat/Golongan								Jumlah
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Korpri	8	1	4	1	1	1	-	-	16
	Jumlah	8	1	4	1	1	1			16

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Bagian	Pendidikan														Jml
		S3		S2		S1		Dipl		SMTA		SMTP		SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Korpri	-	-	1	1	9	1	1	1	2	-	-	-	-	-	16
	Jumlah			1	1	9	1	1	1	2						16

2.2.2. Sumber Daya Modal/Aset

Disamping dukungan Sumber Daya Manusia, juga diperlukan dukungan sarana prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao memiliki sarana prasarana tergambar pada Tabel 2.2.2 Sebagai Berikut :

Tabel 2.2.2
DAFTAR ASET SEKRETARIAT KORPRI 2015

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	TINGKAT KEBUTUHAN
	KOMPUTER	1	BAIK	CUKUP
	PRINTER	2	RUSAK	CUKUP
	NOTE BOOK/LAPTOP	2	BAIK	CUKUP
	LEMARI	3	BAIK	CUKUP
	MEJA KERJA ½ BIRO	3	BAIK	CUKUP
	KURSI FERNEKEL	6	BAIK	CUKUP
	MESIN KETIK	2	BAIK	CUKUP
	KENDARAAN RODA 2	4	BAIK	CUKUP
	CALKULATOR	2	RUSAK	CUKUP
	PENUNJUK WAKTU	1	BAIK	CUKUP
	CAMERA	1	BAIK	CUKUP
	Wireless	1	BAIK	CUKUP

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Sekretariat Korpri

Disamping dukungan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana, maka perlu juga diperhatikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao meliputi kegiatan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

- a. Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Meningkatnya sistem koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- c. Terlaksananya Kegiatan PORSENI Provinsi NTT yang diikuti beberapa cabang Olah Raga diantaranya Catur Dan Tenis Meja

Pada Tahun 2009-2013 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao memiliki kinerja seperti pada Tabel 2.3 Sebagai Berikut :

Tabel. 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- 1					Realisasi Capaian Tahun ke- 1					Rasio Capaian pada Tahun ke- 1				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Pembinaan KORPRI Pembinaan,																		
1	Jumlah Beasiswa yang diberikan kepada siswa	-	✓	-	-	-130 org	-	-	-	-	-130 org	-	-	-	-	-100%	-	100%	-
2	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan peringatan HUT KORPRI	-	-	-	600 org	800 org	1.050 org	1300 org	1.300 org	600 org	800 org	1.050 org	1300 org	1.300 org	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
3	Jumlah atlit yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional	-	✓	-	-	-	-	1 org	-	-	-	-	1 org	-	-	-	-	-	100%
4	Jumlah atlit yang mengikuti Porseni Tk. Provinsi NTT	-	✓	-	-	-	-20 org	-	-16 org	-	-	-20 org	-	-16 org	-	-	-100%	-	100%
5	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Lomba HUT KORPRI	-	✓	-	600 org	800 org	1.050 org	1300 org	1.300 org	600 org	800 org	1.050 org	1300 org	1.300 org	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
6	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan Rakerda	-	✓	-	-	-	-4 kec	-	4 kec	-	-	-4 kec	2 Org	4 kec	-	-	-100%	-	100%

Tabel. 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	532.765.620	887.170.250	545.553.760	648.937.990	901.639.380	419.067.166	401.473.553	476.182.372	446.412.086	307.688.891	78,65%	101,2%	88,30%	69,84%	89,58%	22.739.690	77.124.345
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	48.300.000	46.000.000	47.200.000	57.930.000	62.230.000	35.900.000	42.575.000	47.200.000	56.210.000	59.650.000	74,33%	92%	100%	97,03%	95,85%	-2.786.000	4.750.000
- Belanja Barang dan Jasa	142.621.350	88.106.500	309.349.200	446.467.575	449.761.220	132.826.600	288.104.500	301.518.749	427.281.875	431.249.891	93,22%	99,99%	97,47%	95,70%	95,88%	-60.769.245	59.684.658
- Belanja Modal	13.775.000	49.480.000	18.100.000	10.000.000	10.000.000	13.650.000	48.930.000	18.100.000	9.959.999	10.000.000	99,09%	98,89%	100%	99,50%	100%	755.000	730.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Tantangan dan Peluang kedepan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao adalah menciptakan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

1. Tantangan

- a. SDM PNS masih rendah
- b. Dukungan dana yang masih terbatas
- c. Loyalitas yang masih kurang
- d. Solidaritas dan soliditas rendah
- e. Rendahnya disiplin Pegawai
- f. Kurang profesional
- g. Rendahnya pengetahuan tentang aturan
- h. Korupsi dan Nepotisme
- i. Minset dan Culturset masih KORPRI lama
- j. Godwil Pemerintah masih kurang

2. Peluang

Dengan melihat tantangan yang ada, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao maka seluruh PNS/Anggota KORPRI mempunyai wadah dan tujuan pelayanan sebagai berikut :

- a. Anggota KORPRI sebagai kekuatan pembangunan, jika memiliki soliditas dan solidaritas yang tinggi serta profesional dalam tugas pelayanan
- b. Iuran KORPRI dapat menjadi modal usaha bagi hasil dengan PT/Koperasi atau usaha-usaha produktif lainnya yang berdampak pada peningkatan kesra PNS
- c. Penyetoran uang iuran anggota KORPRI secara rutin perbulan dikelola untuk tambahan kesra PNS dan keluarganya antara lain, uang pensiun, uang duka, biaya pengobatan, bantuan bea siswa bagi anak-anak PNS kurang mampu.

- d. Dukungan dana APBD secara rutin tiap tahun anggaran.
- e. Dukungan fasilitas yang memadai dari pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- f. Adanya Koperasi KORPRI

2.4.3. Isu dan Permasalahan Strategi Sekretariat Korpri

Isu dan Permasalahan strategi Sekretariat Korpri dirumuskan berdasarkan Identifikasi Faktor-faktor lingkungan strategi yaitu lingkungan Internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Isu dan permasalahan strategi kedepan

- Kualitas dan produktivitas serta pembangunan komunikasi antar pegawai meningkat.
- Adanya penggunaan dana yang efektif dan efisien pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
- Adanya komitmen profesionalisme kreatifitas serta kedisiplinan PNS dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab
- Adanya pengawasan dari Pimpinan kepada bawahan dalam melaksanakan budaya kerja.
- Adanya komitmen untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait.
- Terjadinya koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan bagian Sekretariat korpri Kabupaten Rote Ndao

b. Perubahan Internal yang perlu dilakukan

- Peningkatan sumber daya aparatur
- Penambahan sarana dan Prasarana
- Meningkatkan profesionalisme dan disiplin kinerja aparatur
- Mengoptimalkan pembagian tugas dan pelaksanaanya
- Penempatan PNS sesuai dengan keahlian sesuai amanat PP 41 tahun 2008.
- Penempatan PNS sesuai dengan Pola Standar Minimal

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao belum berdampak secara signifikan karena adanya beberapa permasalahan yang mendasar antara lain :

1. Sarana Prasarana gedung pendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao belum memadai (*referensi peraturan Perundang-Undangan, Teknologi Informasi dan lain-lain*)
2. Mekanisme kerja antara pejabat struktural dan staf pelaksana kurang sinergis
3. Masih rendahnya taraf kesejahteraan aparatur PNS anggota KORPRI
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pejabat struktural
5. Kurangnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
6. Terbatasnya sumber daya aparatur
7. Kurangnya sarana prasarana
8. Kurangnya disiplin kerja aparatur

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi Kabupaten Rote Ndao

Adapun Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”.

Bermartabat terdiri dari kata BERTumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

➤ **BERTUMBUH :**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT :**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT :**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang didukung dengan atmosfer kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

3.2.1. Misi Kabupaten Rote Ndao

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan kedalam 6 (enam) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:

1. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, sosial budaya dan Keamanan Negara.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013 – 2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang guna menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

Kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan NTT yang telah meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur 25 – 30 % per tahun sejak APBNP Tahun 2011 berimbas juga pada kabupaten ini dengan makin mantapnya jalan Provinsi, meningkatnya sarana prasarana bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Namun sebagai Kabupaten Kepulauan, sangat diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi darat, laut dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya.

Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila didukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan berdaya saing di era globalisasi.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.

Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 107 Pulau, 8 Pulau diantaranya berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dan sekitar 50% merupakan Desa/ Kelurahan pesisir yang memiliki sumberdaya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis dan kepentingan masyarakat.

Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan surfing, diving, snorkeling dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata.

Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan direorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sebagai kabupaten terluar yang berbatasan dengan negara lain sekaligus memiliki kedekatan geografis dengan ibukota propinsi, Kabupaten Rote Ndao memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Besarnya potensi ekonomi dan potensi pasar yang dimiliki oleh daerah dan negara tetangga menjadi peluang untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai sektor terutama perdagangan, pengembangan industri, pengembangan pariwisata dan pembangunan perikanan dan kelautan.

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan

maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan.

publik perlu di dukung dengan sistem informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas hubungan berbagai *stakeholders* yang ada yaitu pemerintah, dunia swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum dan adanya *check and balanced* di antara ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan organisasi publik.

Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif.

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L PROVINSI

Visi dan Misi KORPRI Nasional yang berlaku sekarang ini merupakan : Keputusan MUNAS VII KORPRI Nomor : Kep-05/MUINAS VII/XI/2009 tanggal 19 November 2009 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

Di dalam Anggaran Dasar tersebut ditetapkan Visi dan Misi KORPRI secara Nasional sebagai berikut :

VISI : “TERWUJUDNYA ORGANISASI KORPRI YANG KUAT, NETRAL, DEMOKRATIS, MANDIRI DAN PROFESIONAL UNTUK MEMBANGUN JIWA KORPS (KORSA) PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA DAN KELUARGANYA“.

- MISI** : 1. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun jiwa Korps (Korsa) Pegawai Republik Indonesia;
2. Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
4. Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

Dari Visi dan Misi KORPRI diatas, diharapkan KORPRI dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
2. Membina dan meningkatkan jiwa Korps (Korsa)
3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
4. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
5. Sebagai pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
6. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
7. Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin dan profesionalisme;
8. Mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dengan menelaah Visi, Misi dan Fungsi yang diharapkan dari KORPRI secara Nasional diatas dapat dikemukakan beberapa hal berkenaan dengan Visi, Misi maupun Fungsi tersebut sebagai berikut :

Pertama : Penguatan Organisasi dan Tata Kerja

1. Terbentuknya organisasi KORPRI dan kesekretariatan dengan paradigma dan struktur organisasi di semua tingkat kepengurusan;
2. Membangun komunikasi, koordinasi dan hubungan kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatan dengan membangun sistem jaringan internet, membangun website, dan penerbitan (tabloit, koran, majalah) secara berkala;
3. Memperluas keanggotaan KORPRI di jajaran BUMD, BLU, BHMN, BHUP, LPP dan Lembaga-lembaga lain yang pegawainya digaji melalui anggaran Negara/APBD;
4. Memperkuat organisasi-organisasi otonom dibawah KORPRI yang berfungsi sebagai unit-unit pelaksana teknis antara lain: BAPOR KORPRI, BAPENI KORPRI, LKBH KORPRI, BABINROH, Koperasi KORPRI, Usaha-usaha Ekonomi KORPRI, Yayasan Pendidikan KORPRI, Generasi Muda KORPRI (GEMA KORPRI) dan lain-lain.

Kedua : Penguatan Jiwa Korsa.

1. Membangun solidaritas dan soliditas antar anggota KORPRI;
2. Menyusun dan menata Tata Upacara untuk upacara rutin dan hari-hari besar nasional dan daerah serta Tata Upacara persemayaman dan pemakaman yang baku;
3. Melaksanakan pembinaan Jasmani (Binjas) dan pembinaan kerohanian (Binroh);
4. Memberikan konsultasi dan bantuan hukum;
5. Memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi dan memberikan hukuman/sanksi bagi yang melanggar;
6. Membangun kebanggaan, pembinaan dan disiplin melalui uniform dan pengawasan;
7. Membangun dan memantapkan wawasan kebangsaan.

Ketiga : Terwujudnya Kesejahteraan Anggota, melalui kegiatan Jasmani dan Rohani meliputi :

1. Olahraga;
2. Kerohanian;
3. Diklat;
4. Uniform;
5. Penghargaan;
6. Perlindungan hukum, serta melalui usaha ekonomi meliputi :
 - a) Koperasi;
 - b) Perusahaan-perusahaan;
 - c) Rumah Sakit;
 - d) Yayasan;
 - e) Perumahan Pegawai;
 - f) Kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi.

Keempat : Pengayoman dan Perlindungan Hukum

1. Mengupayakan pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI di seluruh tingkat kepengurusan bekerjasama dengan PERADI;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota KORPRI;
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Peundang-undangan untuk membangun kesadaran hukum bagi anggota KORPRI;
4. Memberikan pendampingan, bantuan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum;
5. Mengupayakan penyelesaian dan pengembalian aset-aset organisasi KORPRI di semua tingkatan yang dikuasai oleh yayasan KORPRI., baik kelompok, maupun perorangan melalui jalur hukum.

Keempat hal yang dikemukakan diatas, merupakan elemen-elemen penting dan strategis dari Visi, Misi dan Fungsi KORPRI yang berskala nasional sebagai pedoman dalam menyusun program dan penganggaran KORPRI di semua tingkatan, Provinsi, Kabupaten/Kota.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Secara Nasional, program nasional KORPRI ditetapkan melalui keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor : KEP-06/MUNAS VII/XI/2009, tanggal 19 November 2009. Program KORPRI yang diputuskan secara nasional ini bersifat pokok-pokok program, sedangkan substansinya ditetapkan melalui Keputusan MUSPROV maupun MUSKAB agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam konteks inilah terlihat kaitan antara program kegiatan KORPRI Nasional dengan program KORPRI Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Berdasarkan Pokok-pokok Program KORPRI Nasional diatas, maka ditetapkan program-program KORPRI Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

A. Organisasi dan Tata Kerja :

1. Pembentukan organisasi dan kesekretariatan KORPRI di semua Kabupaten/kota sesuai hasil Musyawarah Nasional;
2. Menghadiri MUSKAB dan melantik pengurus KORPRI di Kabupaten/ Kota;
3. Menyelenggarakan MUSPROV yang diikuti unsur Kabupaten/kota serta instansi terkait;
4. Mengintegrasikan KORPRI kedalam SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota;
5. Pengembangan organisasi-organisasi otonom dibawah KORPRI.

B. Pembinaan Jiwa Korps (Korsa)

1. Pembinaan Rohani secara Oikomene 1x dalam sebulan;
2. Penetapan Tata Upacara persemayaman dan pemakaman bagia anggota KORPRI yang meninggal dunia, baik dinas maupun purna dinas;
3. Menetapkan system tata upacara yang baku bagi anggota KORPRI pada upacara rutin 17 setiap bulan dan hari-hari besar Nasional;
4. Melakukan kegiatan olahraga bersama semua SKPD tingkat Provinsi 1 kali sebulan.

C. Usaha dan Kesejahteraan :

1. Pembentukan Koperasi gabungan;

2. Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS menjelang pensiun;
3. Bantuan Pendidikan bagi anak-anak PNS;
4. Pelayanan Kesehatan gratis bagi anggota KORPRI dan keluarga;
5. Sosialisasi TASPEN dan BTP kerjasama dengan KORPRI.

D. Pengayoman dan Perlindungan Hukum :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan untuk membangun kesadaran hukum bagi anggota KORPRI;
2. Bimtek Tata Cara Beracara dipengadilan bagi PNS yang berijazah Sarjana Hukum dilingkungan Provinsi;
3. Pembentukan LKBH KORPRI;
4. Memberikan pendampingan, bantuan dan advokasi bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum.

E. Profesionalisme, Disiplin dan Penghargaan :

1. Mempelopori Geraka Disiplin Nasional ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
2. Memberikan penghargaan kepada anggota KORPRI maupun instansi yang berprestasi;
3. Menyertakan Pengurus KORPRI untuk diangkat menjadi anggota BAPERJAKAT.

F. Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

1. Mengupayakan terciptanya situasi dan lingkungan kerja yang kondusif;
2. Mengupayakan konsistensi pelaksanaan program sesuai rencana dengan pelaporan secara berkala serta evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi, akuntabel dan partisipatif;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi ditingkat Provinsi

G. Program Kemitraan antara lain :

1. Mengadakan Pasar Murah, kerjasama dengan instansi/dinas terkait pada setiap HUT KORPRI;
2. Melakukan kegiatan donor darah, kerjasama dengan instansi/dinas terkait.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi secara Internal maupun Eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao kedepan. Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao diatas, terlihat bahwa peran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao sangat penting dalam mendukung Visi dan Missi tersebut.

ANALISIS SWOT

Kekuatan / Strengths

1. Adanya dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
2. Integritas Kepemimpinan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT;
3. Adanya kewenangan koordinasi kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Tersedianya SDM staf administrasi dan staf teknis yang cukup;
5. Ditetapkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pemerintahan dan Pembangunan

Kelemahan / Weaknesses

1. Sarana Prasarana gedung pendukung pelaksanaan tugas Sekretariat KORPRI belum memadai (*referensi peraturan Perundang-Undangan, Teknologi Informasi dan lain-lain*);
2. Mekanisme kerja antara pejabat struktural dan staf pelaksanan kurang sinergis;
3. Masih rendahnya taraf kesejahteraan aparatur PNS anggota KORPRI
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pejabat struktural;
5. Kurangnya pemahaman atas pelakanan tugas pokok dan fungsi.

Peluang / Opportunities

1. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak-anak KORPRI yang berprestasi dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;

2. Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat bagi anggota KORPRI dan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rote Ndao;
3. Peningkatan kualitas pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao;
4. Penegakkan hukum dan reformasi birokrasi di Kabupaten Rote Ndao terus ditingkatkan dalam rangka mendukung birokrasi pemerintahan yang tertib, bersih dan berwibawa, bebas dari KKN;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis Tata Ruang dan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan dalam rangka keberlangsungan kehidupan manusia yang aman dan nyaman di Kabupaten Rote Ndao;
6. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dan kesejahteraan perlu terus ditingkatkan di Kabupaten Rote Ndao ;
7. Peningkatan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao, perlu terus di tingkatkan dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao;
8. Pengentasan kemiskinan, bantuan terhadap korban bencana dan pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Rote Ndao perlu terus di tingkatkan melalui program-program nyata.

Tantangan / Ancaman / Threats

1. Loyalitas semu akibat etos kerja yang buruk dan kurangnya kompetensi pimpinan;
2. Rendahnya pemahaman akan organisasi KORPRI dengan paradigma dan struktur yang baru;

3. Rendahnya rasa solidaritas dan soliditas dalam pembinaan jiwa korsa;
4. Rendahnya pemahaman dalam peningkatan usaha dan kesejahteraan bagi anggota KORPRI;
5. Rendahnya sistem pemberian penghargaan bagi anggota KORPRI.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. **Visi KORPRI** adalah : Terwujudnya organisasi KORPRI yang Kuat, Netral dan Profesional yang mampu membangun jiwa. Korps (Korsa) Pegawai Republik Indonesia dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi dan mensejahterakan anggota dan mendukung terciptanya prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik.

4.1.2. **Misi KORPRI**

1. Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruh jenjang kepengurusan.
2. Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat persatuan Bangsa dan Negara.
3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan hukum. Untuk meningkatkan harkat dan martabat Pegawai Republik Indonesia.
4. Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas KKN dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

4.2. **Tujuan dan Sasaran**

Untuk mewujudkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

a. Tujuan yang ingin dicapai

- Menjadi satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota untuk mencapai tujuan bersama.
- Membangun jiwa Korps (Karsa)
- Menjadi perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara
- Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan.
- Memberikan pengayoman dan perlindungan hukum
- Meningkatkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Republik Indonesia.
- Meningkatkan ketaqwaan, profesionalisme dan disiplin serta bebas KKN.
- Mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan organisasi tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi KORPRI yang solit, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien.
2. Penguatan jiwa Korps dengan sasaran terbangunnya soliditas dan solidaritas anggota KORPRI sebagai Abdi Negara, Abdi masyarakat dan Aparat Birokrasi.
3. Pengembangan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota.
4. Pengayoman dan perlindungan hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

5. Peningkatan profesionalisme disiplin dan pemberian penghargaan dengan sasaran terciptanya aparatur yang kompeten berdedikasi dan berintegritas.
6. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3. PROGRAM 1.

- Pendidikan : Bantuan Pendidikan bagi anak-anak KORPRI
- Strategi : Mengusahakan/memberi bantuan beasiswa bagi anak-anak KORPRI yang berprestasi dan tidak mampu
- Kebijakan :
 - Membangun kerjasama dengan KORPRI Pusat untuk bantuan beasiswa
 - Melakukan seleksi untuk memperoleh nama-nama calon penerima beasiswa
 - Mengusulkan/mengirim nama-nama ke Pusat untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa
 - Mengupayakan bantuan beasiswa bagi anak-anak PNS tidak mampu melalui APBD I/luran KORPRI

PROGRAM 2.

- Kesehatan : Bantuan Pemeriksaan Kesehatan bagi Anggota KORPRI
- Strategi : Melakukan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan gratis bagi Anggota KORPRI
- Kebijakan :
 - Membangun kerjasama dengan BPJS dan Dinas Kesehatan
 - Menetapkan waktu dan persyaratan pemeriksaan
 - Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi PNS/Anggota KORPRI oleh Tim Dokter yang ditetapkan

PROGRAM 3.

- Ekonomi : Menyiapkan Anggota KORPRI menjelang Pensiun untuk berwira

- Kerakyatan usaha
- Strategi : Menyertakan PNS/Anggota KORPRI menjelang Pensiun untuk pelatihan Kewirausahaan
- Kebijakan : ➤ Pendataan PNS/Anggota KORPRI yang akan Pensiun
➤ Mengikutsertakan PNS/Anggota KORPRI dalam pelatihan di luar maupun di dalam wilayah NTT
➤ Memberikan bantuan modal usaha sesuai ketentuan

PROGRAM 4.

- Hukum dan Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Birokrasi Pemerintahan : Hukum (LKBH) KORPRI dan Pembinaan Mental dan Spiritual
- Strategi : Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI, BAPOR, BABINROH dan Penentuan waktu Pembinaan Mental dan Spiritual bagi anggota KORPRI
- Kebijakan : ➤ Sosialisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI
➤ Mendampingi setiap anggota KORPRI yang bermasalah hukum di dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
➤ Pembinaan Kerohanian, Olah Raga sesuai waktu yang ditetapkan bagi anggota KORPRI

PROGRAM 5.

- Pembangunan Infrastruktur : Pembangunan Perumahan bagi PNS/Anggota KORPRI
- Strategi : Menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah bagi PNS/Anggota KORPRI
- Kebijakan : ➤ Kepastian lahan untuk pembangunan rumah bagi PNS/Anggota KORPRI
➤ Kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat
➤ Inventarisasi PNS/Anggota KORPRI yang berhak memperoleh rumah
➤ Pembangunan rumah sesuai ketentuan yang berlaku

PROGRAM 6.

- Peningkatan Kualitas hidup keluarga, perempuan dan anak : Mengupayakan

kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan dan anak

Strategi : Mengusahakan/memberi bantuan modal usaha untuk kegiatan-kegiatan produktif

Kebijakan

- Melakukan kegiatan ceramah dan tanya jawab dalam berbagai bidang kehidupan
- Melakukan kegiatan pasar murah dan pengobatan gratis
- Membantu modal usaha untuk ibu-ibu yang berwira usaha
- Membuka ruang bagi anak-anak mengembangkan minat dan bakatnya, seperti taman bermain dan sebagainya

PROGRAM 7.

Kelautan dan Perikanan : Bantuan untuk kegiatan Kelautan dan Perikanan

Strategi : Mengusahakan bantuan bagi PNS/Anggota KORPRI yang berwirausaha di bidang Kelautan dan Perikanan

Kebijakan

- Menginfentarisasi PNS/Anggota KORPRI yang berniat membuka usaha di bidang Kelautan dan Perikanan
- Membentuk kelompok usaha Kelautan dan Perikanan
- Mengikutsertakan dalam pelatihan
- Mengusahakan bantuan usaha/modal dengan cara memfasilitasi kepada pihak-pihak tertentu
- Membangun kerjasama dengan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM 8.

Pengentasan Kemiskinan : Upaya pengentasan kemiskinan di Rote Ndao

Strategi : Mengupayakan kegiatan-kegiatan produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan

Kebijakan

- Melakukan kegiatan-kegiatan produktif sesuai minat dan bakat anggota
- Meningkatkan peran koperasi agar semakin bermanfaat bagi anggota
- Mendorong keberpihakan pemerintah agar lebih memperhatikan kelompok miskin
- Membentuk koperasi/ikut memberikan modal usaha kepada gabungan koperasi atau PT dengan system bagi hasil untuk anggota KORPRI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif yang tertuang dalam tabel 5.1. ini merupakan rencana jangka menengah 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari Visi, Misi dan program kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang tertuang dalam Kepres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Hasil Musyawarah Nasional KORPRI Tahun 2009 dan Hasil Musyawarah Provinsi KORPRI Tahun 2010.

Mengacu pada rujukan di atas, maka secara substansi ada 3 (tiga) tujuan pokok yang tertuang dalam program/kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) yaitu : a) Meningkatkan kinerja kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, b) Meningkatkan kesejahteraan PNS dan keluarganya serta pembinaan dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI, c) Meningkatkan pembinaan mental spiritual serta solidaritas dan soliditas sesama anggota KORPRI.

Ketiga tujuan pokok tersebut di atas telah dijabarkan dalam program dan kegiatan- kegiatan, sasaran-sasaran dan indikator capaiannya serta pagu pendanaan indikatif yang telah diuraikan secara jelas pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel. 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Peninggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Rote Ndao			1.20.1.20.10.38.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI																	
	1. Meningkatkan Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Rote Ndao	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan		Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 1. Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI se Kabupaten Rote Ndao	Jumlah Forum Komunikasi, Evaluasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1 kali - 200 orang	1 kali 200 org	104.444			1 kali 200 org	80.000			1 kali 200 org		3 kali 600 org	184.444	Bag. I	Rote Ndao	
				Pengumpulan dan Updating data Anggota KORPRI 2. Pengumpulan dan Validasi data Anggota KORPRI	Tersedianya data anggota KOPRI di Kabupaten Rote Ndao		1 dok	172.303	1 dok	130.000	1 dok	130.000	1 dok	130.000	1 dok	150.000	5 dokumen		Bag. I	Rote Ndao	
	2. Terben tuhnya Sekretariat	Jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit		Fasilitasi Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI																	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Pe nanggung jawab	Lo kasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Dewan Pengurus KORPRI Unit	yang terbentuk		3. Sosialisasi Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di 10 Kec	Tersosialisasinya Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di 10 Kec	1 kali			1 kali	140.000								140.000	Bag. I	rote Ndo	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu																	
				4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	Tersedianya laporan yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	1 laporan			1 lap	60.000	1 lap	60.000	1 lap	60.000	1 lap	145.000	4 laporan	325.000	Bag. I	rote Ndao	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu																	
				5. Pemantauan dan Pemanfaatan Pemanfaatan KORPRI di 21 Kab/Kota	Tersedianya data pemanfaatan KORPRI	1 dokumen	1 dok	158.063	1 dok	140.000	1 dok	140.000	1 dok	140.000	1 dok	175.000	5 dokumen	753.063	Bag. I	Rote Ndao	
2. Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan Keluarga	1. Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan Keluarganya	1. Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Kewirausahaan		Pemantapan Persiapan Pensiun PNS																	
				1. Bimtek Kewirausahaan bagi anggota	Jumlah Anggota				200	60.000	200	60.000	200	60.000				600	180.000	Bag. I	rote Ndao

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
serta Pembinaan dan Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI yang bermasalah hukum		2. Jumlah Siswa yang memperoleh bantuan beasiswa		KORPRI yang memasuki masa purna bahakti	KORPRI yang mengikuti Bimtek Kewirausahaan				org		org		org				Org			
				Pemantapan Persiapan Pensiun PNS																
				2. Pembangunan Perumahan bagi PNS Anggota KORPRI 500 Unit	Terbangunnya rumah bagi PNS	500 Unit					150 unit	110.000	150 unit	110.000	200 unit	300.000	500 Unit	520.000	Bag. I	ote Ndao
				Pemanapan Persiapan Pensiun PNS																
				3. Sosialisasi Pelayanan ASKES	Terlaksananya sosialisasi Pelayanan AKES						1 kali	60.000					1 kali	60.000	Bag. I	ote Nd
				Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi PNS																
	1. Meningkatkan Pemahaman PNS tentang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan bantuan hukum dan jumlah PNS yang mendapat pendampingan hukum		1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ Pelayanan konsultasi dan Bantuan Hukum (PKPA)	Jumlah PNS yang mengikuti PKPA						2 org	30.000	2 org	30.000	2 org	30.000	6 orang	90.000	Bag. I	ote Ndao

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)	Jumlah PNS yang mendapat Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)				200 org	140.000	200 org	150.000	200 org	160.000	200 org	180.000	50 orang	630.000	Bag. I	Rote Ndao
				Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi PNS 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan	1 kali			1 kali	50.000	1 kali	50.000	1 kali	50.000			3 kali	150.000	Bag. I	Rote Ndao

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terfasilitasinya Pembinaan KORPRI							
1	Jumlah Forum Komunikasi, Evaluasi dan konsultasi yang dilaksanakan	- 1 kali - 200 orang	1 kali 200 org		1 kali 200 org		1 kali 200 org	- 3 kali - 600 orang
3	Jumlah atlit yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional	2 orang	-	-	-	20 org	-	2 orang
4	Jumlah atlit yang mengikuti Porseni Tk. Provinsi NTT	15 orang	-	-	30 org	-	30 org	30 oang
5	Jumlah PNS yang memperoleh bantuan hukum (LKBH)	10 orang		20 org	20 org	20 org	20 org	80 orang
6	Tersedianya Tenaga Bantuan Hukum Bagi PNS yang bermasalah hukum	10 orang	-		10 org	-	-	10 orang
7	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan	1 kali	-		1 kali	1 kali	1 Kali	3 kali
8	Tersedianya data anggota KORPRI di Provinsi NTT	1 Dokumen			1 dok	1 dok	1 dok	3 dokumen
9	Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan rohani	6.000 orang			800 org	800 org	800 org	2.400 orang
10	Terbangunya rumah bagi PNS	500 Unit	-	-	150 unit	150 unit	200 unit	500 unit
11	Tersedianya data pemanfaatan iuran KORPRI	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dokumen

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Dewan Pengurus Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun 2015 – 2019 ini disiapkan dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao.

Di dalam Rencana Strategi (RENSTRA) ini diuraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, maka Rencana Strategi (RENSTRA) ini memiliki eksistensi yang dinamis sebagai acuan bagi jajaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pendanaannya untuk mewujudkan Aparatur PNS sebagai anggota KORPRI yang kuat, sejahtera, profesional dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dalam rangka penyempurnaannya, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Rencana Strategi (RENSTRA) ini sesuai dengan perkembangan dan perubahan dinamis yang terjadi.

Baa, 27 Januari 2015

SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ROTE NDAO

NYONGKY F. NDOLOE,SH
PENATA TK. I
NIP. 197602082006041008